



ANTRE TES USAP COVID-19 DRIVE THRU

Pengendara mobil antre untuk melakukan tes usap PCR dan Antigen COVID-19 secara "Drive Thru" di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (3/2). Panjang antrean mobil yang hendak melakukan tes usap COVID-19 ini mencapai 300 meter hingga 500 meter ke belakang.

Wahidin Halim: Provinsi Banten Siap Jadi Tuan Rumah PON

"Dalam Desain Besar Olahraga Nasional itu, peran KONI sangat penting dalam proses pembinaan atlet, terutama atlet pada cabang olahraga yang diunggulkan yang harus dikedepankan," kata Wahidin Halim.

SERANG (IM) - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) seiring dengan pembangunan Banten International Stadium yang saat ini memasuki tahap akhir.

"Pemprom Banten dalam waktu dekat akan meresmikan Banten International Stadium (BIS) yang direncanakan akan diresmikan pada tanggal 26 Maret 2022 nanti," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat menghadiri penguku-

han dan pelantikan pengurus KONI Provinsi Banten periode 2021 - 2025 di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen KH Sam'un No.5, di Kota Serang, seperti dilansir Antara, Kamis (3/2).

"Berdiri di atas lahan seluas 62 hektar, BIS itu akan banyak fasilitas penunjang olahraga lainnya yang bisa digunakan oleh para atlet dari berbagai macam cabang olahraga untuk melakukan latihan rutin," kata Wahidin.

Namun, kata Wahidin, saat ini BIS masih dalam tahap penyelesaian akhir dan nanti setelah

diresmikan bisa digunakan. Wahidin juga mengatakan, BIS sudah berstandar FIFA sehingga berbagai fasilitas yang ada sudah sangat lengkap. "Bahkan jika diizinkan, mungkin Provinsi Banten secara infrastruktur sudah lebih siap menjadi tuan rumah PON," katanya.

Wahidin juga menekankan kepada kepengurusan KONI Provinsi Banten yang baru dilantik beserta KONI di Kabupaten dan Kota agar ikut mendukung Program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Dalam Desain Besar Olahraga Nasional itu, peran KONI sangat penting dalam proses pembinaan atlet, terutama atlet pada cabang olahraga yang diunggulkan yang harus dikedepankan," kata Wahidin.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kinerja kepengurusan KONI Provinsi

Banten di bawah kepemimpinan Rumiha Kartoredjo yang telah membawa olahraga Banten ke peringkat 13 besar pada saat PON ke-XIX di Jawa Barat tahun 2016 lalu.

Menurut Wahidin, prestasi itu tidak didapat dengan mudah, melainkan dengan penuh perjuangan, keseriusan dan persiapan matang yang dilakukan oleh Pengurus KONI Provinsi Banten. Terlebih, sebelumnya Provinsi Banten berada pada peringkat 21.

"Ini sebuah lontaran yang luar biasa yang dilakukan oleh kepengurusan KONI Provinsi Banten. Dan ke depan, saya meminta kepada pengurus KONI yang baru agar bisa lebih meningkatkan lagi prestasi olahraganya," katanya.

Sementara Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman mengatakan, pihaknya berharap kepengurusan KONI Provinsi Banten yang baru ini agar mendukung Desain

Besar Olahraga Nasional yang dicita-citakan Presiden Jokowi bisa tercapai, yakni menjadikan olahraga Indonesia peringkat lima besar pada tahun 2045. "Hal itu dalam rangka mengyongsong generasi emas di usia 100 tahun Indonesia," kata Marciano.

Marciano juga menegaskan, Provinsi Banten tidak menutup kemungkinan akan menjadi tuan rumah PON, mengingat berbagai pembangunan fasilitas olahraga sudah dilakukan oleh Gubernur WH, dari mulai BIS sampai berbagai fasilitas venue lainnya. "Selama fasilitasnya memadai, Banten bisa menjadi tuan rumah PON," katanya.

Ketua KONI Provinsi Banten Periode 2021-2025 Edi Ariadi menyatakan akan fokus terhadap peningkatan prestasi para atlet olahraga yang ada di Banten. "Makanya saya targetkan pada PON berikutnya, Banten bisa masuk 10 besar," katanya. ● pra

Pemkot dan Kejari Kota Tangerang Perpanjang Kerja Sama

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terkait bidang perdata dan tata usaha negara dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah secara langsung melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama bersama dengan kepala Kejaksaan Negeri kota Tangerang Erich Folanda.

Arief menyampaikan sinergitas yang terjalin antara Pemkot dengan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang harus menjadi budaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. "Kerja sama ini sebagai upaya membangun profesionalitas. Budaya dan semangat berintegritas dan akuntabel harus terus menjadi budaya," ungkap Arief dalam acara yang berlangsung secara hybrid di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (3/2). Arief mengatakan, den-

gan adanya kerja sama ini, akan membantu jajaran OPD Pemkot Tangerang dalam menjalankan setiap program pembangunan yang telah direncanakan. "Selama tidak menyalahi aturan yang ada, program pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat harus dilakukan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda mengungkapkan perpanjangan perjanjian kerja sama merupakan kesediaan bersama untuk menjalin kerja sama dalam mendukung tugas yang berimplikasi pada penegakan hukum, koordinasi terkait penerapan hukum serta hal lain yang dianggap perlu dilakukan kerja sama sesuai dengan koridor kewenangan yang sudah digariskan undang-undang khususnya pada bidang perdata dan tata usaha negara.

"Diharapkan dapat membantu dan mendukung program kerja Pemkot untuk mencapai target kinerja yang lebih optimal," kata Erich. ● pp

Investor RRT Tertarik Bangun Kereta Gantung di Kudus

KUDUS (IM) - Investor asal Tiongkok tertarik untuk mengembangkan wisata kereta gantung atau gondola di daerah pegunungan di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. "Lokasi yang diminati sekitar Desa Ternadi dan Colo (Kecamatan Dawe)," kata Bupati Kudus Hartopo di Kudus, seperti dilansir Antara, Kamis (3/2).

Ia mengungkapkan investor asing tersebut hanya sebatas menyampaikan ketertarikan dan belum ditindaklanjuti dengan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor asal Tiongkok tersebut.

Sementara yang sudah ditindaklanjuti dengan MoU, yakni Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo Kudus yang hendak dijadikan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi energi listrik untuk keperluan penerangan. Kemudian ada lahan kosong bekas gedung pertemuan ng-

sirah di Jalan Jenderal Sudirman serta bekas pusat perbelanjaan Matahari Plaza Kudus di Jalan Loekmono Hadi Kudus.

Rencananya lahan kosong tersebut akan dibangun hotel sekaligus pusat perbelanjaan. Jika diperbolehkan juga berminat menjadikan Pasar Klirwon sebagai pasar grosir untuk ditata agar menjadi pusat perbelanjaan modern.

Untuk memastikan rencana investasi kereta gantung tersebut, Pemkab Kudus juga menemui investor tersebut di Jakarta guna memastikan keseriusannya membangun kereta gantung. "Rencananya, mereka akan melakukan survei lokasi terlebih dahulu guna memastikan daerahnya cocok untuk dibangun kereta gantung atau tidak," ujarnya.

Promosi yang dilakukan selama ini, diakui baru bisa menggaet investor asal Tiongkok, sedangkan investor dalam negeri belum ada yang tertarik menanamkan investasinya di Kudus. ● pur

Kwarda Jateng Targetkan 50.000 Pramuka Garuda

PEMALANG (IM) - Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Tengah terus mendorong lahirnya Pramuka Garuda di semua tingkatan, baik siaga, penggalang, penegak dan pandega. Bahkan, setiap Kwartir Cabang ditargetkan dapat mencetak 200 orang Pramuka Garuda hingga 2023 mendatang.

Hal itu ditegaskan Ketua Kwarda Jateng Atikoh Ganjar Pranowo, saat Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang dan Kwardcab Gerakan Pramuka Kabupaten Pemalang, di Pendapa Kabupaten setempat, Kamis (3/2). Ketua Mabicab Pemalang dijabat Bupati Mukti Agung Wibowo, dan Ketua Kwardcab Sukarso.

Menurut Atikoh, Pramuka Garuda merupakan tahapan tertinggi dalam setiap tingkatan, yang memiliki karakter mulia, kecakapan dan keterampilan mumpuni, serta nasionalisme tinggi.

Pihaknya menargetkan, pada 2023 mendatang terdapat 50 ribu orang Pramuka Garuda, dan saat ini tercapai hampir 18 ribu orang Pramuka Garuda. Diakui, pandemi Covid-19 membuat pencapaian Pramuka Garuda mengalami kesulitan, karena kegiatan pembelajaran dilakukan jarak jauh. Saat

ini, meski pembelajaran tatap muka sudah berlaku, namun masih dibatasi. "Kegiatan bisa berinovasi. Meski PTM masih dibatasi, tapi bisa diadaptasikan dengan kebiasaan baru," ujar Atikoh dalam rilis Diskominfo Jateng, Kamis (3/2).

Ditambahkan, Duta Perubahan Perilaku ikut berperan dalam mendorong Pramuka Garuda. Kwardcab diminta lebih aktif, sehingga syarat kecakapan umum (SKU) dan syarat kecakapan khusus (SKK) dapat terfasilitasi. "Mereka bisa ujian, karena pencapaian tertinggi di tiap jenjang adalah Pramuka Garuda," katanya.

Atikoh menambahkan, pada 2022 ini, akan diselenggarakan Jambore Nasional di Cibubur, dengan peserta terbatas. Karenanya, seluruh Kwardcab diminta dapat segera melakukan seleksi dan menyiapkan personel, untuk diberangkatkan pada ajang tersebut.

Tak hanya itu, tuturnya, pada 2022 ini, akan diselenggarakan ajang mengirim Kontingen Besar untuk mengikuti Jambore Dunia ke-25 di Korea Selatan. Pada pendaftaran tahap pertama yang berakhir Januari lalu, sudah ada 157 orang calon peserta Jambore

Dunia yang didaftarkan. Namun, pendaftaran masih dibuka hingga Maret 2022.

"Dari Pemalang belum ada Pramuka Penggalang yang menjadi bagian dari kontingen ini. Nanti kami akan sosialisasikan lagi saat Rakerda, sambil memantau kondisi pandemi Covid-19. Kami berharap tahun ini kondisinya pulih, sehingga Jambore Dunia bisa dilaksanakan," tandas Atikoh.

Sementara itu, Ketua Mabicab Pemalang dijabat Bupati Mukti Agung Wibowo, menambahkan, Gerakan Pramuka sangat strategis sebagai pilar, pembangunan karakter dan kepribadian generasi muda bangsa. Melalui kepramukaan yang dilaksanakan dalam suasana gembira dan menyenangkan, generasi muda diharapkan dapat mengambil pelajaran tentang arti dan nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan kerja sama, dalam mencapai tujuan bersama.

"Selama pandemi, perlu terobosan out of the box dalam berkegiatan, sesuai tata cara kehidupan kenormalan baru. Dia pun berharap Pramuka ikut menyosialisasikan vaksinasi, serta disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19," ujarnya. ● pra



PASAR SEMBAKO MURAH DI BANDAR LAMPUNG

Sejumlah warga antre membeli sembako murah di Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (3/2). Gerai pasar murah tersebut menjual minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter, beras Rp45 ribu hingga Rp55 ribu per lima kilogram, gula pasir Rp10 ribu per kilogram dan tepung terigu Rp8 ribu per kilogram.

Stok Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Tangerang Aman

TANGERANG (IM) - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Diapertan) Kabupaten Tangerang, Banten memastikan stok pupuk bersubsidi untuk para petani pada masa tanam di awal tahun 2022 di daerah itu dipastikan aman. "Kita menerima stok pupuk dari pemerintah pusat melalui provinsi itu dipastikan aman untuk para petani di tahun 2022 itu," kata Kepala Penyuluh Pertanian Muda pada Dispertan Kabupaten Tangerang, Sahri di Tangerang, seperti dilansir Antara, Kamis (3/2).

Ia menyampaikan, apabila nantinya ada petani yang mengalami kesulitan mendapat pupuk, maka dipersilakan untuk melapor kepada petugas lapangan yang ada di masing-masing kecamatan. "Untuk teknis mendapat pupuk sekarang ini berbeda, kalau dulu sistemnya melalui produsen mendapat pupuk itu lalu dibagikan sesuai kebutuhan. Dan sekarang sistemnya secara elektronik atau melalui kartu tani Indonesia (KTI)," katanya.

Ia menjelaskan, para petani yang memerlukan pupuk tersebut akan diberikan jatah masing-masing sesuai dengan kebutuhan pada musim tanamnya. Dan petani juga sebelum membeli pupuk itu harus

terlebih dahulu memesannya. "Nanti ke depan kita akan memasang alat pemesanan elektronik pupuk khusus petani di setiap ruko milik produsen atau pun di setiap bank milik pemerintah," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, untuk sistem transaksi secara elektronik ini memang saat ini masih menjadi kendala para petani, karena tidak sedikit dari mereka dapat mengerti cara transaksi pemesanan pupuk tersebut. Oleh karenanya, pihaknya pun melalui petugas lapangan dan ketua kelompok tani (poktan) yang ada, akan terus mensosialisasikan secara bertahap kepada para petani.

"Jadi memang masih banyak petani kita yang belum mengerti cara pemakaian kartu tani Indonesia, padahal kartu itu sudah diberlakukan sejak tahun 2017 oleh pemerintah pusat. Sehingga kita akan kembali untuk mensosialisasikan nya," tuturnya.

Adapun untuk harga pupuk, lanjut dia, masih tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET), seperti harga pupuk urea Rp2.250 per kilogram, Za Rp1.700 per kilogram, SP36 Rp2.400 per kilogram, pupuk organik Rp800 per kilogram dan pupuk NPK Rp2.300 per kilogram. ● yy

Wali Kota Arief Beberkan 5 Isu Strategis Pembangunan Tahun 2023

TANGERANG (IM) - Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang berlangsung secara daring, Kamis (3/2). Arief menyampaikan rencana pembangunan tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019 - 2023, di mana perlu diperhatikan secara cermat terkait target kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD.

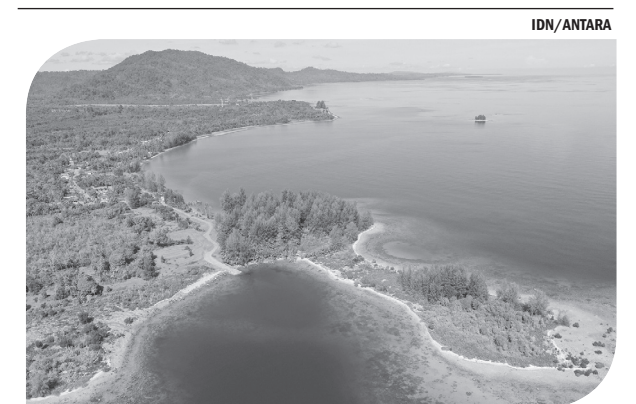
"Capaian target kinerja yang belum maksimal pada tahun sebelumnya, agar menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2023," ujar Arief dalam rapat yang diikuti seluruh kepala OPD Pemkot Tangerang seperti dilansir dari laman Pemkot Tangerang.

Dalam kesempatan tersebut, Arief menjabarkan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot

Tangerang berfokus pada penangan dampak Covid-19, khususnya untuk memutus mata rantai Covid-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat. "Situasi ini tentu berdampak pada menurunnya kinerja pembangunan pada aspek lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya," ungkapnya.

Selain itu, Arief juga menyampaikan terkait lima isu strategis yang telah dirumuskan terkait rencana pembangunan tahun 2023, diantaranya perekonomian daerah yang belum stabil, penurunan kualitas SDM, pemantapan kualitas infrastruktur daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup

serta peningkatan kualitas layanan publik yang didukung dengan kinerja aparatur yang maksimal. "Seluruh perangkat daerah agar segera merealisasikan program yang terkait dengan penuntasan kemiskinan dan pengangguran tahun 2022," kata Arief. ● yan



OBJEK WISATA PULAU SIMEULUE

Foto udara terlihat kawasan objek wisata pantai gantung di Desa Kuala Makmur, Simeulue Timur, Simeulue, Aceh. Kamis (3/2). Kabupaten terluar pulau Simeulue Provinsi Aceh memiliki puluhan objek wisata berupa pantai di pulau-pulau yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berlibur.

Wagub Emil Dukung Apersi Sediakan Rumah untuk MBR

SURABAYA (IM) - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong adanya relaksasi perizinan pembangunan agar Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) bisa menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Emil saat membuka Musyawarah Daerah DPD Apersi Jatim ke-6 di Surabaya, Kamis, mengatakan sektor konstruksi punya dampak besar bagi perekonomian di Jatim. Termasuk kehadiran sektor swasta menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi. Termasuk sektor perumahan rakyat," kata Emil seperti dilansir Antara, Kamis (3/2).

Menurutnya, negara harus hadir bersama pengembang yang mempunyai cita-cita yang sama untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk dalam penyederhanaan proses perizinan yang saat ini masih menjadi kendala peralihan dari Izin Membangun Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan bagian dari Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

"Peralihan IMB menjadi PBG, kendalanya dengan pemer-

intah pusat yaitu perda-perda yang berkaitan dengan peralihan aturan ini tidak ada. Sehingga pemda tidak bisa memungut retribusi terkait izin-izin. Sehingga harus dialihkan, namun jangan sampai proses peralihan yang la itu terhambat," ujarnya.

Emil menegaskan jika memang belum siap Perdanya maka daerah harus melepaskan masalah retribusi atau segera selesaikan perdanya. "Atau cari terobosan hukum apa yang ada, karena semua kembali ke undang-undang peraturan tingkat pusat. Kami akan konsultasi ke Kemendagri," ungkapnya.

Ia berharap peralihan aturan ini tidak mengganggu target pembangunan perumahan unum MBR dengan target 20 ribu rumah di Jatim akan terkendala. "Kalau bisa kita challenge juga Apersi Jatim agar bisa membuat 15 persen atau 30 ribu rumah. Karena kuota nasional 200 ribu dan biasanya Jatim minimal 1/6," katanya.

Emil juga akan berupaya memberikan advokasi untuk pengamanan lahan untuk pembangunan rumah MBR. "Harus diadvokasi agar pembangunan rumah untuk Apersi ini tidak hanya dikembangkan di wilayah yang jauh dari perkotaan," katanya. ● pur